

ISSN : 1978-0362

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF



Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF
Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Volume 12, Nomor 2, April 2018

PENGELOLA JURNAL

Ketua Penyunting/Editor-in-Chief:

Achmad Zainal Arifin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sekretaris Penyunting/Managing Editor:

Muryanti (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Penyunting Pelaksana/Editors:

Achmad Norma Permata (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Firdaus Wajdi (Universitas Negeri Jakarta)

Napsiah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Yayan Suryana (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Astri Hanjarwati (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sulistyaningsih (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Rilus A. Kinseng (FEMA Institut Pertanian Bogor)

Sekretariat/Secretary:

Novia Tensiani (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Mitra Bestari/Editorial Board:

Alix Philippon (Sciences Po Aix France)

M. Nur Ichwan (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Zuly Qadir (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Syarifudin Jurdi (UIN Alauddin Makassar)

Gregory Vanderbilt (Eastern Mennonite University United States)

Diterbitkan oleh:

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi:

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta

Telp (0274) 51957; Fax. (0274) 519571

Email:

sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id dan

sosiologirefleksif@gmail.com

Jurnal Sosiologi Reflektif (JSR) adalah jurnal ilmiah berkala yang memfokuskan diri pada hasil penelitian terkait isu-isu sosial-keagamaan di masyarakat Muslim, khususnya yang berkenaan dengan upaya penguatan civil society dari berbagai aspeknya. Selain itu, JSR juga menerima artikel yang bersumber pada telaah pustaka terkait dengan upaya pengembangan teori-teori sosiologi yang terinspirasi dengan studi keislaman, seperti: pengembangan wacana tentang Ilmu Sosial Profetik, Islam Transformatif, atau pendekatan-pendekatan lainnya.

JSR focuses on disseminating researches on social and religious issues within Muslim community, especially related to issue of strengthening civil society in its various aspects. Besides, JSR also receive an article based on a library research, which aims to develop integrated sociological theories with Islamic studies, such as a discourse on Prophetic Social Science, Transformative Islam, and other perspectives.

JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF

DAFTAR ISI

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON INDONESIAN MUSLIM WOMEN'S CONSUMPTION OF ISLAMIC FASHION <i>Durrotul Mas'udah</i>	179
AKTIVISME, FILANTROPI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI YOGYAKARTA : Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta <i>Ahmad Arif Widiyanto</i>	193
RADIKALISASI GERAKAN JAMAAH ANSHARUT TAUHID DAN PENGARUH ISIS DI INDONESIA <i>Asman Abdullah</i>	213
EKSISTENSI <i>PUBLIC SPHERE</i> DALAM MEDIA MAINSTREAM: Studi pada Rubrik <i>Citizen Journalism</i> Tribun Yogyakarta <i>Yanti Dwi Astuti</i>	233
KONFLIK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI DESA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN <i>Yunindyawati¹, Evalidya¹, Yusraini¹, Rohim Pahrozi²</i>	251
PERAN AKTOR DALAM SOSIOLOGI PEMBANGUNAN: Analisis Pergub D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja <i>Mohammad Wildan Azmi</i>	267

STRATEGI BERJARINGAN RADIO KOMUNITAS ISLAM MADU FM TULUNGAGUNG	
<i>Redi Panuju</i>	289
MASYARAKAT BADUY DALAM PERGULATAN TIGA JARINGAN MAKNA	
<i>Efa Ida Amaliyah</i>	313
TRANSFORMASI KESETARAAN BURUH: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls	
<i>Mohammad Takdir</i>	327
MENETAS JALAN BARU PENGEMBANGAN MASYARAKAT: Sebuah Jawaban di Era Milenium	
<i>Suraji, Muhammad Ali Embi</i>	353
PEMBANGUNAN SEBAGAI KEBEBASAN DAN PENCAPAIAN PERUBAHAN SOSIAL	
<i>Amril Maryolo Ar.....</i>	367
PERGESERAN NORMA SOSIAL PADA REMAJA DI KOTA TANJUNGPINANG	
<i>Endri Bagus Prastiyo.....</i>	381
PARTISIPASI KOMUNITAS MUSLIM DESA DALAM USAHA PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI INDONESIA	
<i>Heru Dian</i>	395
LITERATUR KEISLAMAN GENERASI MILENIAL	
<i>Syafuddin Sholeh TS</i>	413

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wr. wb.

Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 12 Nomor 2, April 2018 ini mengkaji permasalahan sosial yang kompleks dalam perspektif sosiologis. Kajian yang diketengahkan mencakup persoalan konflik nelayan, eksistensi ruang publik dalam media massa, kajian perempuan dan problem masyarakat sehari-hari, termasuk nelayan, organisasi sosial dan keagamaan.

Durrotul menulis tentang *The Impact Of Social Media On Indonesian Muslim Women's Consumption Of Islamic Fashion*. Tulisan ini memaparkan analisis tentang media sosial sebagai sebuah alat konsumsi baru dan pengaruhnya terhadap pola konsumsi fashion Islami oleh wanita Muslim di Indonesia. Hasil analisis menyimpulkan bahwa media sosial, yang dapat dilihat sebagai sebuah alat konsumsi baru, mempengaruhi pola konsumsi fashion Islami oleh wanita Muslim di Indonesia dalam dua cara yang saling berhubungan: (1). media sosial menjadi sebuah ruang konstruksi berbagai macam standar yang dianggap ideal tentang penampilan wanita Muslim yang fashionable dan (2). media sosial mempengaruhi cara-cara wanita Muslim di Indonesia dalam mengkonstruksi dan mempresentasikan identitasnya sebagai wanita Muslim yang fashionable. Kedua hal ini membentuk pola konsumsi mereka terhadap fashion Islami.

Ahmad Arif Widiyanto menulis tentang *Aktivisme, Filantropi Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Di Yogyakarta : Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta*. Penulis menjelaskan artikel ini membahas dinamika aktivisme perempuan Yayasan Sahabat Ibu (YSI) dalam melakukan pemberdayaan perempuan di Yogyakarta. Awalnya YSI terbentuk dari perempuan-perempuan aktivis yang tergerak untuk melakukan *recovery* terhadap anak-anak dan perempuan pasca gempa bumi di Yogyakarta melalui kegiatan filantropis dan motivasi. Aktivisme mereka berlanjut seiring beruntunnya bencana alam di Yogyakarta dari tahun 2006-2012. Para aktivis tersebut kemudian mendeklarasikan diri sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam tulisan ini, Dinamika YSI dibahas dalam tiga poin; *pertama*, potret aktivisme perempuan dan filantropi di Indonesia. *Kedua*, dinamika aktivisme YSI dari karitatif menuju pemberdayaan produktif. *Ketiga*, Upaya YSI untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan filantropi atau *fundraising* dari lembaga donor melalui pengembangan ekonomi produktif dan pembentukan koperasi simpan pinjam.

Asman Abdullah menulis tentang Radikalisasi Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid dan Pengaruh Isis di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menyorot gerakan Jamaah Anshorut Tauhid. Gerakan JAT merupakan gerakan jihad dengan tujuan memperjuangkan Syariat Islam di Indonesia. Dua hal yang patut disorot dari gerakan JAT *pertama*, keterlibatan JAT dalam pelatihan militer Aceh tahun 2010. Pelatihan militer ini melibatkan lintas *tanzhim* jihad di Indonesia. Alumni dari pelatihan ini kelak membentuk jaringan radikal baru yang berafiliasi dengan ISIS. *Kedua*, pengaruh ISIS di Indonesia melahirkan perpecahan bagi JAT. Bagi jihadi JAT yang mendukung ISIS tetap bertahan dibawah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir dan Aman Abdurrahman sedangkan yang menolak bergabung dengan ISIS harus keluar dari *tanzhim*. *Ketiga*, mereka yang keluar dari JAT membentuk jamaah baru dengan nama Jamaah Anshorut Syariah (JAS) dibawah pimpinan Muhammad Achwan.

Yanti Dwi Astuti menulis tentang Eksistensi *Public Sphere* dalam Media Mainstream: Studi pada Rubrik Citizen Journalism Tribun Yogyakarta. Fenomena *Citizen Journalism* menjadi trend dalam dunia jurnalisme dan menjadi ruang publik baru bagi masyarakat. Salah satu media mainstream yaitu koran Tribun Jogja mengadopsi tren tersebut ke dalam rubriknya yang dinamakan rubrik Citizen journalism. Namun dalam prakteknya, terdapat banyak sekali kecenderungan pemberitaan yang tidak sesuai dengan makna hakiki dari *citizen journalism* dan ruang publik itu sendiri. Dimana cenderung sangat datar dan deskriptif tidak menyentuh pada esensi dari makna ruang publik yaitu pada proses diskusi yang megedepankan debat rasional dan kritis serta masih diberlakukannya proses penseleksian dan editing oleh redaktornya. Hal ini sangat kontras dengan semangat hadirnya *citizen journalism* yang bersifat bebas dari intervensi siapapun, menyuarakan pendapat secara leluasa, interaktifitas, tidak terbatas oleh halaman (*unlimited space*), tidak ada persaingan antar penulis, dan tidak adanya penseleksian ketat terhadap konten beritanya.

Yunindyawati, Evalidya, Yusnaini dan Rohim Pahrozi menulis tentang Konflik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Sungsang

Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Dalam masyarakat pesisir, konflik adalah salah satu gejala sosial yang sering kita jumpai di sekitaran daerah mayoritas nelayan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi antara lain konflik karena penggunaan alat tangkap yang merugikan, tumpang tindih lokasi penangkapan, pengrusakan alat tangkap dan kenakalan remaja. Penyelesaian konflik melibatkan berbagai pihak. Jika secara musyawarah mufakat tidak bisa menyelesaikan masalah, maka akan dilanjutkan dengan mediasi oleh pihak pemerintah desa. Langkah selanjutnya yang ditempuh jika mediasi tidak berhasil maka berlanjut ke pihak berwenang seperti dinas terkait dan bahkan kepolisian.

Wildan Azmi menulis tentang Peran Aktor dalam Sosiologi Pembangunan: Analisis Pergub D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja. Artikel ini menjelaskan peran aktor kebijakan dalam sosiologi pembangunan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. PERGUB D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja adalah upaya pemerintah sebagai aktor dalam meningkatkan pelayanan publik melalui sektor transportasi publik (Bus Trans Jogja). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan bukan sekedar dari sektor ekonomi dan politik saja, melainkan sektor sosial juga memiliki peran penting dalam pembangunan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian aktor kebijakan dalam sosiologi pembangunan dari sektor transportasi publik (Bus Trans Jogja) memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Redi Panuju menulis tentang Strategi Berjaringan Radio Komunitas Islam Madu Fm Tulungagung. Fenomena radio komunitas Madu FM sangat menarik untuk diteliti karena merupakan stasiun radio komunitas yang berhasil tumbuh di tengah penyiaran kontestasi. Radio komunitas mendapat pembatasan pembatasan (pembatasan) negara melalui Undang-Undang Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran). Selain itu, radio komunitas masih harus bersaing dengan radio swasta dan televisi swasta. Madu FM mampu beradaptasi dengan keadaan tanpa melanggar peraturan. Hasilnya adalah strategi penyiaran radio komunitas berhasil berinovasi inovasi sehingga menjadi ada. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Penelitian dilakukan selama periode dari bulan Maret sampai Agustus 2016.

Efa Ida Amaliyah menulis tentang Masyarakat Baduy dalam

Pergulatan Tiga Jaringan Makna. Tujuan tulisan ini mengeksplorasi tentang tiga jaringan makna yang menjadi teori Bernard Adeney-Risakotta, yaitu agama, modernitas, dan budaya nenek moyang pada masyarakat Baduy yang mempunyai pola sedikit berbeda. karena ada dua Baduy, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Luar sudah terpengaruh pada modernitas, yaitu teknologi (televise dan transportasi), institusi dan gagasan (ide). Tidak ada konfrontasi dari luar Baduy, karena mengedepankan kebersamaan dan saling menghormati. Baduy Luar masih memegang teguh budaya nenek moyang dengan patuh pada puun sebagai kepala suku. Mereka tetap memakai identitas sebagai masyarakat Baduy, yaitu pakaian yang merupakan ciri khas Baduy. Baduy Dalam dalam menerima tiga jaringan di atas. Baduy Dalam merupakan masyarakat yang menonjolkan budaya nenek moyang.

Mohammad Takdir menulis tentang Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls. Artikel ini bertujuan untuk mengubah paradigma tentang buruh yang selalu dipandang sebagai sekelompok masyarakat yang terbelakang dan tertindas. Dalam memandang relasi buruh dan majikan, sebagian orang seringkali menggunakan paradigma perbudakan daripada paradigma kemanusiaan (*humanitarian paradigm*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam sebuah struktur sosial masyarakat lebih diakibatkan oleh hilangnya rasa empati yang mendalam terkait dengan argumen kesetaraan (*equality*) sebagai kata kunci dalam konsepsi keadilan. Rawls menawarkan konsep tentang *justice as fairness* yang harus menjadi pijakan utama dalam memperjuangkan kesetaraan buruh dalam berbagai aspek, terutama menyangkut pemenuhan hak, kewajiban dan kesejahteraan hidup.

Suraji, Muhammad Ali Embi menulis tentang Menetas Jalan Baru Pengembangan Masyarakat: Sebuah Jawaban di Era Mellineum. Pengembangan masyarakat proses bergerak ke arah suatu tahap atau kondisi di mana masyarakat menjadi semakin kompeten terhadap permasalahan dan kondisi komunitas maupun lingkungannya. Kompetensi masyarakat yang semakin meningkat ini diharapkan dapat menimbulkan aktivitas pembangunan atas prakarsa masyarakat (komunitas) sendiri. Pengembangan masyarakat juga sebagai gerakan, yang berusaha melakukan reformasi terhadap kondisi yang dianggap kurang menguntungkan. Dalam konteks saat ini tentu pengembangan masyarakat (community development) didasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan masyarakat lokal menuju kemajuan dan

kesempurnaan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di era globalisasi. Kajian yang relevan dalam community development adalah kajian pengembangan masyarakat yang sejalan dengan peran lembaga Perguruan Tinggi yaitu memfungsikan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Amril Maryolo menulis tentang Pembangunan Sebagai Kebebasan dan Pencapaian Perubahan Sosial. Kajian sosial memiliki macam variasi karena masyarakat bukanlah objek yang tunggal. Perubahan sosial merupakan fenomena konstruksi masyarakat yang memiliki ragam yang bervariasi. Pembangunan merupakan suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, sosial, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu “pembangunan” disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. Bersamaan dengan teori pembangunan terdapat teori-teori perubahan sosial lainnya seperti sosialisme, dependensia, ataupun teori lain.

Endri Bagus Prastiyo menulis tentang Pergeseran Norma Sosial Pada Remaja di Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini sedang berkembang, namun memiliki berbagai masalah terkait dengan pergeseran nilai yang terjadi pada generasi mudanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran norma sosial dikalangan remaja Kota Tanjungpinang dimana mereka telah banyak melakukan pelanggaran norma sosial yang ada di masyarakat, mulai dari adanya remaja yang mengkosumsi minuman berakohol, menggunakan narkoba, bahkan melakukan seks bebas. Perilaku ini terjadi karna ada faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran norma itu terjadi, yaitu faktor secara internal dan eksternal, internal berasal dari dalam diri remaja itu sendiri, sementara eksternal merupakan faktor yang didapat dari luar diri remaja.

Heru Dian menulis tentang Partisipasi Komunitas Muslim Desa dalam Usaha Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. Terbentuknya BUMDes sebagaimana tertuang dalam UU No.6/2014 belum sepenuhnya mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan, karena hanya sekitar 9,09% desa yang dinilai mampu merealisasikan program BUMDes, bahkan dari jumlah prosentase tersebut hanya terdapat sekitar 21,68% BUMDes yang dinilai menguntungkan. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pembangunan program BUMDes. Satu faktor paling penting adalah kurangnya pengembangan modal sosial di pedesaan.

Demikian kajian Jurnal Sosiologi Reflektif Edisi 12 Nomor 2. Semoga artikel yang penulis sajikan memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Wallahu a'lam bi showab

Wassalamualaikum wr.wb

**JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF**



PARTISIPASI KOMUNITAS MUSLIM DESA DALAM USAHA PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI INDONESIA

Heru Dian

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional

Alamat Email : herudiansetiawan@civitas.unas.ac.id

Abstract

The establishment of Village Enterprise (BUMDes), as mandated in UU No.6/2014, has not fully solved various economic problems within the village level. This is based on the fact that only 9,09 percent of villages across the country is considered success in realizing programs of the Village Enterprises. Moreover, from that small percentage, only 21,68 percent of Village Enterprises that are able to make profits through their programs. There are some factors influencing the failure of Village Enterprises' programs. One important factor that should be noticed here is the lack of developing social capital of the village. This fact implicitly shows the low participation of the biggest social capital of the village, which is the Muslim community of the village. Therefore, this descriptive qualitative research is aimed to analyze some factors that influenced the low participation of the Muslim community of the village in managing the Village Enterprises in Indonesia. Using the theory of Korten, which states that the success and the failure of participation can be categorized into two: internal and external factors. The result shows that the leadership model of the head of village has significant influence on raising the level of participation of Muslim community. Besides, the government should also actively support and assist the programs run by the Village Enterprises.

Keywords : Participation, Muslim village, Management, and Village Enterprise

Intisari

Terbentuknya BUMDes sebagaimana tertuang dalam UU No.6/2014 belum sepenuhnya mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan, karena

hanya sekitar 9,09% desa yang dinilai mampu merealisasikan program BUMDes, bahkan dari jumlah prosentase tersebut hanya terdapat sekitar 21,68% BUMDes yang dinilai menguntungkan. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pembangunan program BUMDes. Satu faktor paling penting adalah kurangnya pengembangan modal sosial di pedesaan. Secara implisit ini menandakan rendahnya partisipasi modal sosial terbesar dan terpenting yang dipunyai Indonesia yaitu komunitas muslim desa. Untuk itu, kajian yang berproses deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi komunitas muslim desa dalam usaha pengelolaan BUMDes di Indonesia, dengan menggunakan pendapat Korten yang mengemukakan bahwa kesuksesan atau kegagalan partisipasi dikelompokkan dalam dua kategori yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Partisipasi, Muslim Desa, Pengelolaan dan Badan Usaha Milik Desa.

Pendahuluan

Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa, juncto Peraturan Pemerintah No.43/2014, juncto Peraturan Pemerintah No.47/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sesungguhnya telah diamanatkan pula dalam Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh ketentuan sebelumnya, Undang-Undang No.22/1999, dan Peraturan Pemerintah No.71/2005 tentang Desa), sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas guna mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

Substansi kebijakan di atas pada dasarnya merupakan janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat desa berdasar pada kebutuhan dan potensi desa. Oleh karenanya pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri dengan menggunakan sumberdaya lokal dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). BUMDes diharapkan menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial*)

institution) yang tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Sementara tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

Namun sejak kebijakan BUMDes ditetapkan, keberadaan BUMDes belum sepenuhnya membuahkan hasil yang memuaskan, meskipun Pemerintah telah mengucurkan dana Desa ± 60 trilyun rupiah pada tahun 2017.¹ Berdasar data Kementerian Desa² tercatat sebanyak 6.811 BUMDes dari sebanyak 74.910 desa yang ada di Indonesia atau sekitar 9,09% desa yang merealisasikan program BUMDes.³ Jika memang dinyatakan terdapat sebanyak 24,62% BUMDes, maka hal ini masih tetap kurang signifikan perkembangannya karena jumlah desa berkembang yang ada saat ini mencapai sebanyak 51014⁴ atau baru terdapat sekitar 12560 desa yang merealisasikan program BUMDes. Sementara BUMDes yang aktif hanya sekitar 8000 unit dan hanya 4000 BUMDes yang dinilai menguntungkan.⁵ Hal ini berarti terdapat sekitar 43,40% BUMDes yang aktif dan terdapat sekitar 21,68 % yang dinilai menguntungkan. Padahal Pemerintah berencana akan menaikkan dana desa tahun 2018 dari semula (2017) Rp 60 triliun menjadi Rp 120 triliun. Jika rata-rata desa pada tahun 2017 mendapatkan uang

1 <https://news.detik.com/berita/d-3487085/mendes-tahun-depan-alokasi-dana-naik-tiap-desa-bisa-dapat-rp-2-m>, diakses pada hari Rabu 1 November 2017, jam 20.17 WIB.

2 Diolah dari http://datin.kemendes.go.id/pusdatin/simporal/grafik_pdt_provinsismry.php#cht_grafik_pdt_provinsi_ipd_jumlahdesatertinggal, diakses pada hari Rabu 1 November 2017, jam 21.06 WIB.

3 <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/27/185143526/jumlah.bumdes.mencapai.jumlah BUMDes sebanyak 18.446 unit atau sekitar 24,62% dari total jumlah desa di Indonesia>, diakses pada hari Rabu 1 November 2017, jam 22.03 WIB.

4 Diolah dari http://datin.kemendes.go.id/pusdatin/simporal/grafik_pdt_provinsismry.php#cht_grafik_pdt_provinsi_ipd_jumlahdesatertinggal, diakses pada hari Rabu 1 November 2017, jam 21.06 WIB.

5 <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170329/281981787423398>, diakses pada hari Rabu 1 November 2017, jam 23.14 WIB.

Rp800 juta hingga Rp 1 miliar (tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk), maka tahun depan setiap desa bisa mendapatkan uang Rp1,6 miliar, dengan catatan tidak akan memberikan dana segar tambahan pada desa-desa yang 2017 tidak ada kemajuan.⁶

Kenyataan tersebut di atas memerlukan upaya-upaya untuk mengurangi dan/atau bahkan menghilangkan ketidakberhasilan program BUMDes. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pembangunan dan pengembangan program BUMDes. Satu faktor paling penting adalah kurangnya pengembangan modal sosial di pedesaan. Kondisi modal sosial yang dimiliki masyarakat desa masih berbanding terbalik dengan kondisi modal ekonomi desa. Modal sosial masyarakat desa tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi desa.⁷ Ketidakberhasilan pengembangan BUMDes disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan jasa BUMDes.⁸ Beberapa ilmuwan sosial seperti Putnam⁹ (1993) dan Fukuyama¹⁰ (2001) percaya bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Hasil penelitian Tiballa¹¹ menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi masyarakat masih cukup besar, hal tersebut dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bumdes. Sementara

6 <https://news.detik.com/berita/d-3487085/mendes-tahun-depan-alokasi-dana-naik-tiap-desa-bisa-dapat-rp-2-m>, diakses pada hari Rabu 1 November 2017, jam 20.17 WIB.

7 Harmiati dan Abdul Aziz Zulkhikim dalam Susilo, Budi dan Komara, K. Eko. 2016. *Baseline Research "Membangun Gerakan Desa Wirausaha"*. (Yogyakarta: Yayasan Penabulu), hlm. 2.

8 Rio Halomoan, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014 (Studi : BUM Desa Mitra Usaha Mulya dn BUM Desa Langkitin di Kecamatan Rambah Samo)*, <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11933>, diakses pada hari Jum'at 20 Oktober 2017, jam 21.31 WIB.

9 Primadona, *Peranan Modal Sosial Dan Modal Manusia Dalam Wirausaha*, Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Snema-2015 Padang-Indonesia. ISBN: 978-602-17129-5-5, menjelaskan pendapat Putman bahwa modal sosial dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi. Artinya modal sosial telah ditunjukkan sebagai sumber potensi pertumbuhan ekonomi.

10 Dodi Faedlulloh, *Modal Sosial Dalam Gerakan Koperasi*, IJPA-The Indonesian Journal Of Public Administration, Volume 2 Nomor 1 Nopember 2015, hal. 11, menjelaskan pendapat Fukuyama bahwa modal sosial ditransmisikan melalui mekanisme-mekanisme cultural seperti agama, tradisi, atau kebiasaan sejarah. Modal sosial lebih menekankan pada komunitas moral dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan seperti: kesetiaan, kejujuran, dan *dependability*.

11 Ryanti Tiballa, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Bumdes di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur*, eJournal Ilmu Pemerintahan 2017, 5 (1): 445-456 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (print), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, 2017, hal. 455.

Cahyono dan Adhiatma¹² menyimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan dapat dilakukan tidak hanya melalui pemberdayaan ekonomi, namun juga melalui penguatan modal sosial yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga-lembaga sosial dengan memfokuskan pada penguatan aspek kepercayaan, *mutual respect* dan *mutual benefit*, serta memperhatikan faktor budaya dan nilai-nilai yang berlaku. Bahkan Pontoh¹³ menyimpulkan hubungan antara kelompok masyarakat berdasarkan kepercayaan atau religi dengan kelompok masyarakat berdasarkan kegiatan ekonomi, serta pengaruh tokoh informal (tokoh agama) dengan pihak luar yang sangat berpotensi untuk menggerakkan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Kajian tersebut di atas secara implisit menandakan rendahnya partisipasi modal sosial terbesar dan terpenting yang dipunyai Indonesia yaitu komunitas muslim desa¹⁴ dalam usaha pengelolaan BUMDes. Komunitas muslim desa inilah sebagai aset penting untuk lebih menciptakan peluang meningkatkan kesejahteraan ekonomi pedesaan melalui pemanfaatan dan pengelolaan BUMDes di Indonesia.¹⁵ Jika komunitas muslim (desa) kuat, maka bukan tidak mungkin kejayaan Islam muncul kembali seperti kemajuan yang terjadi pada era Kerajaan Aceh Darussalam di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636M) mencapai kemajuan yang sangat luar biasa dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan agama. Banten pada abad ke-17 Masehi sebagai pintu gerbang pelayaran dan perdagangan internasional, juga sebagai pusat pendidikan Islam. Ternate di belahan Timur sebagai pusat penyebaran

12 Budhi Cahyono dan Ardian Adhiatma, *Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jurnal CBAM-FE, Vol. 1 No. 1 December 2012.

13 Otniel Pontoh, *Identifikasi dan Analisis Modal Sosial Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara*, UNSRAT. Manado 95115, Vol. VI-3, Desember 2010.

14 Diolah dari <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-komunitas-manfaat-komunitas-dan-beberapa-pertimbangan-dalam-pembentukan-komunitas/>, bahwa Komunitas merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi satu sama lainnya yang dibentuk dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional.

Retno Widayani, *Studi tentang Kemunculan Modal Sosial*, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, JKAP Vol. 17 No 2, November 2013, ISSN 0852-921, hal. 67, disebutkan bahwa Grootaert & Bastelaer (2002) menekankan peran penting dari adanya perkumpulan/asosiasi lokal.

15 Hal ini mengingat bahwa desa memiliki kondisi modal sosial masyarakat yang sangat kuat dan telah mengakar. Salah satu bentuk modal sosial yang dimaksud dapat digambarkan melalui beragamnya ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat dimiliki masyarakat desa sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Islam dan sebagai pusat perdagangan cengkeh.¹⁶

Meskipun demikian, perlu dilakukan kajian secara mendalam terkait partisipasi komunitas muslim desa dalam usaha pengelolaan BUMDes di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi¹⁷ komunitas muslim desa dalam usaha pembangunan dan pengelolaan BUMDes di Indonesia, dengan menggunakan pendapat Korten¹⁸ yang mengemukakan bahwa kesuksesan/kegagalan partisipasi dikelompokkan dalam dua kategori yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal, dimaksudkan sebagai faktor dari dalam komunitas yang berpengaruh dalam program partisipasi. Hal ini meliputi empat hal. Pertama, menyangkut sejarah komunitas itu sendiri, apakah mempunyai sejarah yang panjang dan solid atautkah pendek dan tidak solid. Komunitas yang mempunyai sejarah perjuangan panjang dan telah teruji dalam banyak tantangan tentunya akan lebih maju dibandingkan komunitas yang tidak mempunyai sejarah perjuangan panjang. Kedua, berkaitan dengan struktur dan kapasitas komunitas tersebut. Satu komunitas terkadang mempunyai kapasitas yang baik, sementara komunitas lain tidak. Ketiga, terkait dengan sumber daya atau *resources* yang dimiliki komunitas. Satu komunitas terkadang mempunyai sumber daya (baik alam maupun manusia) yang lebih dibanding dengan komunitas lain. Komunitas seperti ini tentunya mempunyai kemungkinan berkembang lebih tinggi dibanding

16 Mirhan Am, *Proses Pembentukan Komunitas Muslim Indonesia*, *Studia Insania*, Oktober 2014, ISSN 2088-6306, Vol. 2, No. 2, hlm. 86-87, diakses pada hari Kamis 2 November 2017, jam 22.43 WIB.

17 Pius A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2006), hal. 655, menjelaskan bahwa partisipasi merupakan pengambilan bagian, pengikutsertaan.

Sedangkan Y. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), hal. 7, menjelaskan bahwa partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran atau langsung dalam bentuk fisik.

Paling tidak ada dua pengertian partisipasi, (1) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai dukungan rakyat dengan ukuran kemauan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uang maupun tenaga; (2) partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

18 Korten, F. (1983) "Community Participation: A management perspectives on obstacles and options." Dalam Korten, D.C. dan Alfonso, F.B. eds. *Bureaucracy and the Poor*. West Hartford,

Conn: Kumarian Press, serta Setiawan, B. (1998) *Local Dynamics in Informal Settlement Development: A Case Study of Yogyakarta, Indonesia* PhD. Dissertation, University of British Columbia, Canada.

komunitas yang tidak mempunyai sumber daya. Keempat, berkaitan dengan kepemimpinan dalam komunitas itu sendiri (*community leaderships*). Satu komunitas yang mempunyai sumber daya tinggi tidak selalu berkembang karena tidak adanya kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan itu sendiri akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain: (1) motivasi pemimpin, (2) latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan, (3) kapasitas kepemimpinan/skill; dan (4) hubungannya dengan pihak luar.

Faktor eksternal dimaksudkan sebagai faktor yang berasal dari luar komunitas, terdiri dari dua aspek. Pertama, menyangkut sistem sosial politik makro dimana komunitas tersebut berada. Dalam satu sistem yang otoriter, tentunya partisipasi akan sulit diharapkan berkembang dan sukses. Sementara dalam sistem sosial-politik yang lebih terbuka dan demokratis, partisipasi akan lebih mempunyai harapan atau peluang. Hal lain yang perlu dicatat adalah dari sisi birokrasi pemerintah yang seringkali menghambat proses partisipasi yang efektif. Meskipun secara politis satu negara telah dinyatakan sebagai negara yang demokratis, pada prakteknya proses partisipasi sering mendapatkan hambatan dari kelompok birokrasi yang melihat partisipasi akan mengurangi kekuasaan dan kesempatannya mendominasi proses pembangunan. Kedua, berkaitan dengan ada atau tidaknya *intermediary agencies* atau agen-agen perantara yang dapat menjadi penghubung antara komunitas dan dunia atau pihak-pihak luar. Agen-agen penghubung ini dapat berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi sosial-kemasyarakatan lain. Apabila agen-agen ini secara aktif dapat membantu komunitas dan menghubungkannya dengan kekuatan-kekuatan lain di luar komunitas, diharapkan partisipasi akan berhasil.

Untuk mencapai tujuan kajian ini, peneliti menggunakan proses penelitian deskriptif kualitatif, dan pendekatannya konstruktivisme, yang memahami realitas atau temuan penelitian sebagai produk interaksi peneliti dengan yang diteliti. Sampel penelitian difokuskan pada Pekon (desa) Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tenggamas Provinsi Lampung.¹⁹ Adapun informan penelitian difokuskan pada: Kepala Pekon Gisting Bawah, Direktur BUMDes Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten

¹⁹ Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tenggamas Provinsi Lampung selain merupakan satu dari 6 (enam) desa yang mempunyai BUMDes terbaik se-Indonesia dan bahkan satu-satunya BUMDes yang tercepat pengembangannya di mana dalam kurun waktu 2 (dua) tahun telah memiliki asset sekitar 4 milyar, di samping itu juga Kabupaten Tenggamas memiliki keragaman dan kesatu-paduan antar komunitas muslim desa.

Tenggamus Provinsi Lampung, Tokoh Jama'ah Tabligh Provinsi Lampung²⁰, Pengasuh Pondok Pesantren Provinsi Lampung, dan Tokoh Masyarakat Provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data dengan: observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif dengan tiga tahapan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Menariknya kajian ini karena pada prinsipnya komunitas muslim (desa) harus tampil sebagai *problem solver* dan juga menjadi *part of the problem*, bagian dari masalah bangsa. Sebagaimana Wali Songo berdakwah hingga ke pelosok Nusantara dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa Islam benar-benar agama *rahmatan lil 'alamin*. Oleh karenanya, ketika ada program pembangunan yang berhubungan dengan rakyat, seperti BUMDes, maka komunitas muslim (desa) seyogianya bisa menjadi kekuatan Indonesia untuk menghadapi liberalisasi (baik di bidang politik, ekonomi, maupun budaya) pasca reformasi yang masuk secara deras ke Indonesia. Sementara masyarakat (desa) Indonesia umumnya tidak cukup siap dengan keadaan tersebut. Rakyat (desa) gagap, gamang, galau menghadapi tantangan itu, sementara di dalamnya ada umat Islam. Yusril Ihza Mahendra²¹ mengatakan bahwa umat Islam seolah menjadi tamu di negeri sendiri. Jika ini terus berlanjut, dengan ke-Indonesia-an yang goyah, dan umat Islam di dalamnya juga goyah, maka dalam rentang waktu yang panjang Indonesia tidak akan tampil sebagai negara. Apalagi keberadaan umat Islam cenderung terus menurun baik secara kuantitas (dari 95% menjadi 85%)²² maupun kualitasnya di tengah upaya menjadikan desa sebagai daerah yang didorong untuk siap menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN, tahun 2015) dan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*, tahun 2015).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Komunitas Muslim Desa Dalam Usaha Pengelolaan BUMDes di Indonesia

20 Hasil wawancara dengan Tokoh Jama'ah Tabligh Provinsi Lampung pada tanggal 5 November 2017, Jam 11.40 WIB, dijelaskan bahwa komunitas Jama'ah Tabligh bukanlah sebuah organisasi murni yang mempunyai badan hukum seperti NU atau Muhammadiyah.

21 <http://www.nu.or.id/post/read/73565/mengapa-jumlah-umat-islam-di-indonesia-menurun>, diakses pada hari Jum'at 3 November 2017, jam 20.11 WIB.

22 <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/islam/item248?>, diakses pada hari Jum'at 3 November 2017, jam 20.11 WIB.

1. Faktor Internal

Pertama, penyebaran agama Islam di wilayah kajian mempunyai sejarah yang panjang dan menggunakan konsep kebudayaan melalui kesenian wayang dan seni musik yang bernafaskan ajaran-ajaran agama Islam.²³ Penyebaran agama Islam kemudian berkembang melalui Majelis Ta'lim untuk menyampaikan dakwah dalam bentuk pengajian-pengajian terbatas yang diadakan di mesjid-mesjid, mushala-mushala, madrasah-madrasah, ataupun di rumah-rumah. Awal perjalanan berkembangnya kegiatan pengajian di Majelis-majelis Ta'lim ini memiliki akar sejarah yang kuat. Kegiatan-kegiatan pembinaan agama Islam seperti yang dilakukan pada kegiatan pengajian di Majelis-majelis Ta'lim ini telah berkembang sejak masuknya agama Islam ke kawasan Nusantara ini. Kegiatan pembinaan Islam ini berlangsung sangat sederhana, tanpa organisasi formal, tanpa kurikulum resmi, ataupun aturan-aturan lainnya.

Kini, banyak ragam Majelis Ta'lim baik dibentuk oleh masyarakat setempat, Majelis Ta'lim berbentuk yayasan, Majelis Ta'lim berbentuk Ormas, Majelis Ta'lim di bawah ormas, dan Majelis Ta'lim di bawah Orsospol. Di Kabupaten Tanggamus terdapat sebanyak 1657 Majelis Ta'lim yang tersebar di 20 kecamatan.²⁴ Sebagaimana halnya terjadi di berbagai wilayah Indonesia, keberadaan Majelis Ta'lim di wilayah kajian juga cenderung masih lebih terfokus pada peningkatan iman dan akhlak tetapi masih kurang menyentuh kesejahteraan dan ekonomi jamaah. Oleh karenanya berbagai program desa seperti BUMDes menjadi hal yang kurang menarik untuk diperhatikan oleh pengurus atau guru yang menjadi figur sentral komunitas itu.²⁵ Bahkan belum banyak lembaga, partai politik dan ormas Islam yang memiliki kesadaran dan kepedulian untuk memberdayakan potensi sosial politik yang dimiliki Majelis Ta'lim. Mereka hanya dimanfaatkan pada saat pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah,

23 Evi Kusmiana, Iskandar Syah, dan M. Basri, *Penyebaran Agama Islam Oleh Sekh Jambu Manglid Pada Abad Ke-16 di Desa Airnaningan Kecamatan Airnaningan Kabupaten Tanggamus*, Jurnal FKIP, UNILA, Provinsi Lampung.

24 <https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/wabup-tanggamus-samsul-hadi-berikan-dana-majelis-talim-pekon-sukajaya-semaka/>, diakses pada hari Selasa 7 November 2017, jam 20.12 WIB.

25 <https://www.pedekik.com/inilah-peran-tokoh-agama-dalam-pembangunan-desa/>, diakses pada hari Kamis 2 November 2017, jam 21.31 WIB, disebutkan bahwa Menteri Desa Marwan Jaafar menjelaskan dukungan kiyai dan tokoh agama dalam pembangunan desa memiliki peran yang nyata, yang di landasi dengan niat untuk dunia dan akhirat bisa bernilai ibadah.

dan pemilihan kepala desa. Setelah jadi mereka ditinggalkan dan tidak diperhatikan sama sekali. Padahal komunitas tersebut bisa diberdayakan dalam *pilot project* pengembangan usaha ekonomi keluarga, filantropi Islam atau kepedulian sosial, penegakan keadilan dan kesetaraan gender, dan sebagainya.²⁶ Meskipun lembaga nonformal ini cukup mampu meningkatkan kualitas pemahaman dan amalan keagamaan setiap pribadi Muslim,²⁷ tetapi sosialisasi dan *supporting* baik oleh Pemerintah maupun Ormas-ormas Islam kepada Majelis Ta'lim perlu ditingkatkan dan dimplementasikan secara nyata terutama dalam upaya yang berkenaan dengan faktor kesejahteraan dan ekonomi jamaah. Hal ini karena peran dan fungsi majelis taklim yang diyakini dapat merealisasikan cita-cita mulia Islam dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang ideal sesuai dengan kehadiran agama samawi ini sebagai *rahmatan lil alamin*, rahmat bagi semesta alam.

Di samping Majelis Ta'lim yang bersifat non-formal, penyebaran ajaran Islam di wilayah kajian juga diawali dengan pendirian pondok pesantren. Pondok pesantren oleh sebagian komunitas muslim sebagai basis terakhir pertahanan dalam mengembangkan ajaran/dakwah Islam.²⁸ Namun kenyataannya, keberadaan pondok pesantren²⁹ tidak didukung (difasilitasi) oleh Pemerintah jika lembaga pendidikannya masih mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Persepsi masyarakat terhadap kedudukan pondok pesantren pun menjadi ambigu dalam konteks karir dan masa depan anak. Oleh karenanya keberadaan sebagian besar pondok pesantren kurang berkembang pesat akibat kurang memiliki jumlah sumber

26 Sinkronisasi hasil wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ikhwan Madani, Provinsi Lampung, pada hari Sabtu 11 November 2017 Jam 11.31 WIB terhadap kajian Abdul Basit, Pemberdayaan Majelis Ta'lim Perempuan Dalam Perspektif Manajemen Dakwah, Komunika, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Stain Purwokerto, Vol.4 No.2 Juni-Desember 2010, hlm. 251-268.

27 Sinkronisasi hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Provinsi Lampung, pada hari Sabtu 11 November 2017 Jam 11.31 WIB terhadap kajian Amri Almi, Pengembangan Masyarakat Melalui Majelis Ta'lim di Kabupaten Rokan Hulu, Tesis, Bogor, Sekolah Pascasarjana, IPB, 2010, hal. 77. <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/43232/2010aal.pdf;jsessionid=9E52C11EC149107292D4EC139B2BA184?sequence=2>, diakses pada hari Selasa 7 November 2017, jam 19.41 WIB.

28 Hasil wawancara dengan Tokoh Jama'ah Tabligh Provinsi Lampung dan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ikhwan Madani, Provinsi Lampung, pada hari Sabtu 11 November 2017 Jam 11.31 WIB.

29 <http://www.raudlatululumkencong.com/2014/02/alamat-lengkap-pondok-pesantren-di.html#>. Wgp63LVpHIU, diakses pada hari Sabtu 4 November 2017, jam 21.03, bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki sebanyak ±25 Pondok Pesantren.

daya santri berikut sarana dan prasarananya.³⁰ Selanjutnya sebagian besar pondok pesantren telah melakukan perubahan menjadi sebuah Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Itu pun dengan catatan bahwa pondok pesantren memiliki kriteria tertentu dianggap telah mapan, didukung oleh persyaratan yang cukup mapan, seperti bangunan, tanah, guru yang berkompeten, murid-murid yang banyak serta tersedianya tenaga administrasi. Pondok pesantren yang seperti inilah yang dianggap layak (mendapat dukungan dana dan fasilitas dari pemerintah) untuk mengakomodasi sistem pendidikan formal atau elemen pendidikan lainnya yang berasal dari luar. Meskipun demikian, *supporting* oleh Pemerintah kepada pondok pesantren perlu ditingkatkan dan diimplementasikan secara nyata, karena lulusan pondok pesantren merupakan calon **tokoh agama (kyai/ulama)**, sebagai kelompok “Elite” dalam struktur sosial, politik, ekonomi, serta di kalangan komunitas agama Islam dan masyarakat pada umumnya, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan transformasi masyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi dan agama secara menyeluruh. Di samping itu lulusan pondok pesantren merupakan insan yang berupaya membina umat Islam menuju *khairu umah* (umat terbaik) sebagaimana tersirat dalam ide *profetis (nubuawah, kenabian)* yang terkandung dalam ayat 110 surah Ali ‘Imran yang artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.*

Kedua, struktur komunitas muslim desa terkelompok menjadi beberapa bagian besar, antara lain komunitas muslim yang menjadi bagian dari organisasi massa (Ormas) Islam Nadhatul Ulama, Muhammadiyah, Ikhwanul Muslimin dan Jama’ah Tabligh. Struktur masing-masing komunitas tersebut dibentuk dengan strategi yang berbeda-beda namun tetap dalam konteks menyejahterakan masyarakat desa.³¹ Namun tidak ada satu pun dari struktur komunitas tersebut yang rencana strategisnya bersinergi secara langsung dalam pengelolaan BUMDes. Ormas-ormas Islam cenderung memiliki ego sektoral dalam mengelola dan memajukan perekonomian umat Islam,³² antara lain melalui pendirian koperasi maupun ritel. Sementara

30 Hasil wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ikhwan Madani, Provinsi Lampung, pada hari Sabtu 11 November 2017 Jam 11.31 WIB.

31 Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Provinsi Lampung, pada hari Sabtu 11 November 2017 Jam 11.31 WIB.

32 <http://www.republika.co.id/berita/duniaislam/fatwa/16/03/22/ekonomi/makro/17/09/27/owwueq440-ormas-islam-harus-sinergi-wujudkan-arus-baru-ekonomi>, diakses pada hari Rabu 8 November 2017, jam 21.48 WIB,

kapasitas Ormas Islam terhadap pengelolaan BUMDes hanya sebatas melakukan pendampingan atau advokasi dan/atau melalui dakwah, karena ormas-ormas Islam umumnya tidak mempunyai kapasitas untuk menyediakan subsidi pupuk, BBM (bahan bakar minyak), atau bantuan langsung benih unggul.³³ Ironisnya, pendampingan dan/atau dakwah komunitas muslim desa yang dilaksanakan antara lain oleh Majelis Ta'lim dari berbagai komunitas Ormas Islam tatkala BUMDes Gisting Bawah telah tumbuh berkembang (terjadi pada tahun kedua pendirian BUMDes Gisting Bawah).³⁴ Oleh karenanya, *supporting* dan *monitoring* oleh Pemerintah kepada Ormas-ormas Islam perlu ditingkatkan dan dimplementasikan secara nyata. Sebagaimana Allah swt telah menjelaskan dengan jelas peran pemerintah dalam Al-Qur'an, "(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang maruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan." (QS. Al-Hajj:41)

Ketiga, komunitas muslim desa umumnya memiliki ketersediaan sumber daya yang sangat besar. Hal ini antara lain dapat dilihat dari banyaknya jumlah Majelis Ta'lim baik dibentuk oleh masyarakat setempat, Majelis Ta'lim berbentuk yayasan, Majelis Ta'lim berbentuk Ormas, Majelis Ta'lim di bawah ormas, dan Majelis Ta'lim di bawah Orsospol. Di Kabupaten Tanggamus saja terdapat sebanyak 1657 Majelis Ta'lim yang tersebar di 20 kecamatan.³⁵ Banyaknya jumlah Majelis Ta'lim tersebut sebagian besar tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia dan dana yang kompeten untuk mengelola permasalahan kesejahteraan dan ekonomi jamaah sehingga fungsinya cenderung terfokus sebagai tempat belajar dan kontak sosial.³⁶ Ironisnya, implementasi dakwah Majelis Ta'lim sekarang ini

dan dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ikhwan Madani, Provinsi Lampung, pada hari Sabtu 11 November 2017 Jam 11.31 WIB.

33 Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Provinsi Lampung dan Tokoh Jama'ah Tabligh Provinsi Lampung pada tanggal 5 November 2017, Jam 11.40 WIB (hampir sama dengan apa yang tertulis dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/02/13/njp8eb-pbnu-ormas-tidak-bisa-mengambil-kapasitas-negara>, diakses pada hari Selasa 7 November 2017, jam 19.41 WIB).

34 Hasil wawancara dengan Kepala Pekon Gisting Bawah dan Direktur BUMDes Mandiri Bersatu, pada tanggal 12 November 2017 Jam 11.31 WIB.

35 <https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/wabup-tanggamus-samsul-hadi-berikan-dana-majelis-talim-pekon-sukajaya-semaka/>, diakses pada hari Selasa 7 November 2017, jam 20.12 WIB.

36 <https://bintuahmad.wordpress.com/2012/04/09/majelis-talim-seputar-pengertian-kedudukan-fungsi-dan-tujuan/>, diakses pada hari Selasa 7

justru dimotori dan direalisasikan oleh Direktur BUMDes Gisting Bawah seperti pemberian santunan BUMDes Gisting Bawah kepada anak yatim dan dhuafa serta berbagai kegiatan pembangunan desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan lingkungan di Pekon Gisting Bawah dan sekitarnya.³⁷ Oleh karenanya, *supporting* dan sosialisasi oleh Pemerintah kepada Ormas-ormas Islam perlu ditingkatkan dan diimplementasikan secara nyata.

Keempat, kepemimpinan dalam komunitas muslim desa sebenarnya sangat kuat, namun keterlibatan mereka dalam pengelolaan BUMDes relatif rendah.³⁸ Kepemimpinan yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes Gisting Bawah hanya diwakili oleh tokoh agama setempat yang notabene kurang representatif dan implementatif dalam penyampaian ide.³⁹ Tokoh-tokoh agama yang berasal dari berbagai komunitas muslim desa lebih bersifat pasif dalam menyampaikan dan merumuskan ide dalam pengelolaan BUMDes. Ironisnya, di tengah menurunnya jumlah umat Islam di Indonesia, ide dan upaya memajukan kehidupan umat Islam di wilayah kajian justru datang dari Kepala Pekon Gisting Bawah dan Direktur BUMDes Mandiri Bersatu (keduanya beragama Islam serta bukan merupakan tokoh agama Islam dan penduduk asli Pekon Gisting Bawah) di mana di akhir tahun 2017 direncanakan akan didirikan warung/toko pada setiap pondok pesantren dan pengelolaannya dilakukan oleh para santri pondok pesantren setempat. Oleh karenanya, *monitoring* oleh Pemerintah terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan Desa perlu ditingkatkan dan diimplementasikan secara nyata, terutama terkait proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.⁴⁰

November 2017, jam 21.32 WIB.

37 Hasil wawancara dengan Direktur BUMDes Mandiri Bersatu, pada tanggal 12 November 2017 Jam 11.31 WIB.

38 Hasil wawancara dengan Kepala Pekon Gisting Bawah dan Direktur BUMDes Mandiri Bersatu, pada tanggal 12 November 2017 Jam 11.31 WIB. Dikuatkan oleh wawancara dengan Staf Desa Burangken Kecamatan Setu Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat pada hari Senin 6 November 2017 Jam 11.31 WIB.

39 Hasil wawancara dengan Kepala Pekon Gisting Bawah dan Direktur BUMDes Mandiri Bersatu, pada hari Minggu 12 November 2017 Jam 11.31 WIB, dan dikuatkan oleh wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ikhwan Madani Provinsi Lampung pada tanggal 11 November 2017 Jam 11.31 WIB.

40 Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (difasilitasi Pemerintah. Desa) untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis (Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4/2015, Pasal 1, butir 5).

PP 47/2015, Pasal 80 Butir (3), bahwa unsur masyarakat desa terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan, dan masyarakat tidak mapan.

2. Faktor Eksternal

Pertama, sistem sosial politik makro di wilayah kajian pada khususnya dan Indonesia pada umumnya relatif terbuka dan demokratis guna mendukung pengembangan komunitas muslim desa, sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.⁴¹ Secara konseptual, program BUMDes sebenarnya sudah sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi implementasi kebijakannya seringkali tidak terkoordinasi dengan baik, baik dari aspek sosialisasi, *monitoring* maupun *supporting* dalam pengelolaan BUMDes.⁴² Sosialisasi awal pengelolaan BUMDes lebih banyak diserahkan oleh Kepala Pekon Gisting Bawah termasuk fasilitasi permodalan, informasi, pasar, teknologi dan faktor-faktor penunjang bisnis lainnya. Demikian pula dalam hal *supporting* dalam bentuk regulasi, program maupun bantuan teknis dan permodalan sangatlah dibutuhkan bagi pengelolaan BUMDes. Sosialisasi dan *supporting* pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh Pemerintah dan lembaga terkait lebih bersifat umum (pengawasan anggaran) dan kurang implementatif.⁴³ Demikian pula lemahnya *supporting* kemitraan pendampingan maupun permodalan oleh Swasta, baik yang terkait langsung dengan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat maupun program perusahaan seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR).⁴⁴ Kendala lainnya adalah tidak adanya *monitoring* pelaksanaan BUMDes oleh Pemerintah sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas BUMDes.⁴⁵ Dengan demikian sosialisasi, *supporting* dan *monitoring* oleh Pemerintah merupakan faktor utama terhadap keberhasilan program BUMDes.

Kedua, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa kurang menjalankan fungsinya secara efektif, terutama terkait

41 <https://www.lampungekspres-plus.com/2017/07/21/mui-lampung-gelar-dialog-ormas-islam/>, diakses pada hari Rabu 8 November 2017 Jam 20.04 WIB, bahwa ada kesamaan pendapat atas kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

42 Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Provinsi Lampung dan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ikhwan Madani, Provinsi Lampung, pada hari Sabtu 11 November 2017 Jam 11.31 WIB.

43 <http://www.mediasuaranasional.com/2017/11/pemkab-polres-dankejari-tanggamus.html>, diakses pada hari Rabu 8 November 2017 Jam 21.04 WIB.

44 Hasil wawancara dengan Kepala Pekon Gisting Bawah dan Direktur BUMDes Mandiri Bersatu, pada hari Minggu 12 November 2017 Jam 11.31 WIB.

45 Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Provinsi Lampung, pada hari Sabtu 11 November 2017 Jam 11.31 WIB.

fungsinya menyusun rencana pembangunan desa (termasuk program BUMDes), fungsi melaksanakan rencana/program pembangunan desa, fungsi menggerakkan partisipasi, fungsi swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dan fungsi menampung aspirasi masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh adanya unsur politik sektoral dalam kepengurusan/nepotisme (karena proses pemilihan anggota LPM tidak transparan dan akuntabel) sehingga LPM menjadi tidak *independen* dalam kebijakannya.⁴⁶ Oleh karenanya *monitoring* oleh Pemerintah merupakan faktor utama terhadap peningkatan produktivitas LPM dalam kerangka keberhasilan program BUMDes.

Penutup

Partisipasi komunitas muslim desa dalam usaha pengelolaan BUMDes di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Satu faktor utama keberhasilan pengelolaan BUMDes sangat dipengaruhi oleh faktor internal yakni kepemimpinan Kepala Desa yang bersifat transformasional, yang secara terkoordinatif dan berkesinambungan dengan jiwa sosial sangat tinggi mampu mengelola, membina dan memberikan sosialisasi, *monitoring* dan *supporting* tanpa pamrih baik kepada lembaga BUMDes maupun lembaga atau organisasi lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun demikian Pemerintah Pusat dan Daerah beserta jajaran terkait di bawahnya harus secara bersama-sama pula berupaya memberikan sosialisasi, *monitoring* dan *supporting* yang lebih terimplementatif sehingga dapat menambah semangat dan daya kerja Kepala Desa dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan BUMDes.

Daftar Bacaan

- Basit, Abdul. *Pemberdayaan Majelis Ta'lim Perempuan Dalam Perspektif Manajemen Dakwah*, Komunika, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Stain Purwokerto, Vol.4 No.2 Juni-Desember 2010, hlm. 251-268.
- Conn, Kumarian Press dan Setiawan, B. (1998) *Local Dynamics in Informal Settlement Development: A Case Study of Yogyakarta, Indonesia* PhD.

⁴⁶ Sinkronisasi pendapat Tokoh Masyarakat Provinsi Lampung, dan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ikhwan Madani, Provinsi Lampung pada hari Jum'at 10 November 2017 Jam 11.31 WIB terhadap kajian kajian Abid Muhtarom, *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan*, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Volume I No. 3, Oktober 2016 ISSN 2502 - 3764, hlm. 200-201.

- Dissertation, University of British Columbia, Canada.
- Cahyono, Budhi, dan Ardian Adhiatma, *Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau di Kabupaten Wonosobo*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, *Jurnal CBAM-FE*, Vol. 1 No. 1 Desember 2012.
- Faedlulloh, Dodi. *Modal Sosial Dalam Gerakan Koperasi*, *IJPA-The Indonesian Journal Of Public Administration*, Volume 2 Nomor 1 Nopember 2015.
- Halomoan, Rio. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012-2014 (Studi : BUM Desa Mitra Usaha Mulya dn BUM Desa Langkitin di Kecamatan Rambah Samo)*, <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11933>, diakses pada hari Jum'at 20 Oktober 2017, jam 21.31 WIB.
- Korten, F. 1983. "Community Participation: A management perspectives on obstacles and options." Dalam Korten, D.C. dan Alfonso, F.B. eds. *Bureaucracy and the Poor*. West Hartford,
- Kusmiana, Evi, Iskandar Syah, dan M. Basri, *Penyebaran Agama Islam Oleh Sekh Jambu Manglid Pada Abad Ke-16 di Desa Airnaningan Kecamatan Airnaningan Kabupaten Tanggamus*, *Jurnal FKIP, UNILA, Provinsi Lampung*.
- Partan, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2006).
- Primadona, *Peranan Modal Sosial Dan Modal Manusia Dalam Wirausaha*, Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Snema-2015 Padang-Indonesia. ISBN: 978-602-17129-5-5.
- Pontoh, Otniel., *Identifikasi dan Analisis Modal Sosial Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Desa Gangga Dua Kabupaten Minahasa Utara*, UNSRAT. Manado 95115, Vol. VI-3,
- Mirhan Am, *Proses Pembentukan Komunitas Muslim Indonesia*, *Studia Insania*, Oktober 2014, ISSN 2088-6306, Vol. 2, No. 2, hlm. 86-87, diakses pada hari Kamis 2 November 2017, jam 22.43 WIB.
- Muhtarom, Abid. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan*, *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, Volume I No. 3, Oktober 2016 ISSN 2502 – 3764.
- Slamet, Y. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994).
- Susilo, Budi dan Komara, K. Eko. 2016. *Baseline Research "Membangun*

- Gerakan Desa Wirausaha*". Yogyakarta: Yayasan Penabulu.
- Tiballa, Ryanti. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Bumdes di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur*, eJournal Ilmu Pemerintahan 2017, 5 (1): 445-456 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (print), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, 2017.
- Widayani, Retno. *Studi tentang Kemunculan Modal Sosial*, Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, JKAP Vol. 17 No 2, November 2013, ISSN 0852-921.

Sumber Online

- <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/43232/2010aal.pdf;jsessionid=9E52C11EC149107292D4EC139B2BA184?sequence=2>, Almi, Amri. Pengembangan Masyarakat Melalui Majelis Ta'lim di Kabupaten Rokan Hulu, Tesis, Bogor, Sekolah Pascasarjana, IPB, 2010. diakses pada hari Selasa 7 November 2017, jam 19.41 WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-3487085/mendes-tahun-depan-alokasi-dana-naik-tiap-desa-bisa-dapat-rp-2-m>, diakses pada hari Rabu 1 November 2017, jam 20.17 WIB.
- http://datin.kemendes.go.id/pusdatin/simpora1/grafik_pdt_provinsismry.php#cht_grafik_pdt_provinsi_ipd_jumlahdesatertinggal, diakses pada hari Rabu 1 November 2017, jam 21.06 WIB.
- <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/27/185143526/jumlah.bumdes.mencapai.jumlah BUMDes sebanyak 18.446 unit atau sekitar 24,62% dari total jumlah desa di Indonesia>, diakses pada hari Rabu 1 November 2017, jam 22.03 WIB.
- http://datin.kemendes.go.id/pusdatin/simpora1/grafik_pdt_provinsismry.php#cht_grafik_pdt_provinsi_ipd_jumlahdesatertinggal, diakses pada hari Rabu 1 November 2017, jam 21.06 WIB.
- <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170329/281981787423398>, diakses pada hari Rabu 1 November 2017, jam 23.14 WIB.
- <https://news.detik.com/berita/d-3487085/mendes-tahun-depan-alokasi-dana-naik-tiap-desa-bisa-dapat-rp-2-m>, diakses pada hari Rabu 1 November 2017, jam 20.17 WIB.
- <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-komunitas-manfaat-komunitas-dan-beberapa-pertimbangan-dalam-pembentukan-komunitas/>

- <http://www.nu.or.id/post/read/73565/mengapa-jumlah-umat-islam-di-indonesia-menurun>, diakses pada hari Jum'at 3 November 2017, jam 20.11 WIB.
- <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/islam/item248?>, diakses pada hari Jum'at 3 November 2017, jam 20.11 WIB.
- <https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/wabup-tanggamus-samsul-hadi-berikan-dana-majelis-talim-pekonsukajaya-semaka/>, diakses pada hari Selasa 7 November 2017, jam 20.12 WIB.
- <https://www.pedekik.com/inilah-peran-tokoh-agama-dalam-pembangunan-desa/>, diakses pada hari Kamis 2 November 2017, jam 21.31 WIB.
- <http://www.raudlatululumkencong.com/2014/02/alamat-lengkap-pondok-pesan-tren-di.html#.Wgp63LVpHIU>, diakses pada hari Sabtu 4 November 2017, jam 21.03.
- <http://www.republika.co.id/berita/duniaislam/fatwa/16/03/22/ekonomi/makro/17/09/27/owwueq440-ormas-islam-harus-sinergi-wujudkan-arus-baru-ekonomi>, diakses pada hari Rabu 8 November 2017, jam 21.48 WIB.
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/02/13/njp8eb-pbnu-ormas-tidak-bisa-mengambil-kapasitas-negara>, diakses pada hari Selasa 7 November 2017, jam 19.41 WIB).
- <https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/wabup-tanggamus-samsul-hadi-berikan-dana-majelis-talim-pekonsukajaya-semaka/>, diakses pada hari Selasa 7 November 2017, jam 20.12 WIB.
- <https://bintuahmad.wordpress.com/2012/04/09/majelis-talim-seputar-pengertian-kedudukan-fungsi-dan-tujuan/>, diakses pada hari Selasa 7 November 2017, jam 21.32 WIB.
- <https://www.lampungekspres-plus.com/2017/07/21/mui-lampung-gelar-dialog-ormas-islam/>, diakses pada hari Rabu 8 November 2017 Jam 20.04 WIB.
- <http://www.mediasuaranasional.com/2017/11/pemkab-polres-dan-kejadi-tangga-mus.html>, diakses pada hari Rabu 8 November 2017 Jam 21.04 WIB.